



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IDA KANIAWATI  
2. Jabatan : DIREKTUR DIREKTORAT INOVASI DAN PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS  
3. NHK : 850956

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 980.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/304 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 575.000.000

1. MOBIL, HONDA WRV MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000  
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 25.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.580.000.000

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.580.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.